

TERM of REFERENCE (ToR)
RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) HIDROGRAFI
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI HIDROGRAFI DUNIA TAHUN 2024

1. Dasar:

- a. *International Hydrographic Organization (IHO) Circular Letter 01/2024 dated 08 January 2024 - Theme for World Hydrography Day 2024 and Media Outreach;* dan
- b. Program Kerja Pushidrosal TA 2024.

2. Pendahuluan

Indonesia berada di antara Benua Australia dan Benua Asia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki 17.504 pulau-pulau besar dan kecil, serta panjang garis pantai 108.000 km dengan luas wilayah total meliputi 1,9 juta km² daratan dan 6,4 juta km² wilayah perairan. Jalur-jalur pelayaran di wilayah perairan nasional dan yurisdiksi nasional Indonesia telah menjadi *Sea Lines Of Transportation/Communication (SLOT/C)* strategis bagi perdagangan dunia. Selat Malaka, ALKI-1 (Laut Natuna Utara dan Selat Sunda), ALKI-2 (Selat Makassar dan Selat Lombok) dan ALKI-3 merupakan SLOT/C vital yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kondisi geografis ini telah menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan jalur penghubung lalu lintas komunikasi serta perdagangan laut antar benua dan samudera. Perairan Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan sepuluh negara, yaitu Australia, Timor Leste, Papua New Guinea, Palau, Philipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, dan India. Beberapa segmen batas wilayah telah disepakati, namun masih banyak segmen perbatasan di laut yang masih dalam proses penyelesaian. SLOT, SLOC dan batas maritim berpotensi memberikan ancaman maritim, sengketa batas dan pelanggaran wilayah yang berdampak pada stabilitas keamanan maritim di perairan *choke point* dan perbatasan antar negara tersebut.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kesatuan tanah air Indonesia menjadi semakin erat setelah Indonesia dengan diplomasi berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan pulau-pulau menjadi perairan yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, di mana pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*). Konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Kedaulatan atas perairan kepulauan tersebut diperoleh melalui proses yang diawali Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa.

Posisi strategis Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor geografis sebagai negara kepulauan, menempatkan Indonesia dalam posisi penting lingkungan regional dan internasional. Alam Indonesia sendiri memiliki nilai strategis bagi planet bumi. Indonesia

memiliki hutan tropis kedua terbesar di dunia, 20% terumbu karang dunia, 20% hutan bakau dunia, 3 juta hektar padang lamun, serta dilewati arus yang berasal dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia sehingga menjadikan laut Indonesia kaya akan sumber makanan bagi kehidupan laut. Tidak hanya itu, hutan tropis, hutan bakau, dan padang lamun juga mampu menyerap emisi gas rumah kaca. Kemampuan ini harus menjadi pertimbangan dalam menghitung emisi dan serapan emisi Indonesia sebagai bagian dari solusi masalah pemanasan bumi dan perubahan iklim dunia.

Konferensi Hidrografi Internasional yang diselenggarakan oleh biro hidrografi internasional di Monako dari tanggal 18 April 1967 sampai tanggal 5 Mei 1967 telah menghasilkan Konvensi tentang Hidrografi Internasional beserta peraturan umum dan peraturan keuangannya. Republik Indonesia sebagai negara maritim memandang perlu untuk menjadi peserta konvensi tersebut. Duta Besar Republik Indonesia di Paris telah diinstruksikan untuk menandatangani "*subject to ratification*" dan penandatanganan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1967. Selanjutnya Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tentang Organisasi Hidrografi Internasional (*Convention on the International Hydrographic Organisation*) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 288 tahun 1968 dan menugaskan kepada Pushidrosal yang saat itu bernama Direktorat Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia menjadi Lembaga Hidrografi Nasional, wakil negara di IHO.

Kantor Hidrografi secara resmi dibentuk di Indonesia dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1951 tentang Penunjukan Djawatan Hidrografi Angkatan Laut & Djawatan Hidrografi Pelayaran sebagai perwakilan RI di internasional, regional dan memelihara hubungan dengan biro hidrografi asing. Secara hukum Pushidrosal menjadi Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 164 Tahun 1960 tentang Penggabungan Djawatan Hidrografi Pelayaran ke dalam Djawatan Hidrografi Angkatan Laut, berada di bawah Angkatan Laut serta Penetapan tugas Djawatan Hidrografi Angkatan Laut melaksanakan fungsi hidrografi militer dan hidrografi nasional. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI Nomor 288 Tahun 1968 tentang ratifikasi Konvensi IHO, Pemerintah RI menugaskan Pushidrosal sebagai wakil negara di organisasi internasional IHO. Hal ini semakin menegaskan Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban negara dalam menyediakan layanan hidrografi di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Sebagai Lembaga Hidrografi Militer, Pushidrosal memiliki fungsi menyediakan dukungan informasi hidro-oseanografi untuk mendukung tugas pokok TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang serta tugas TNI AL dalam pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan matra laut sesuai tugas UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan sebagai lembaga hidrografi nasional Pushidrosal memiliki peran utama, sesuai dengan *SOLAS Chapter V regulation 9*, sebagaimana diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan turunannya di bawah Ditjenhubla Kemenhub, untuk menyediakan *hydrographic service* melalui pelaksanaan survei dan produksi peta navigasi laut dan publikasi nautika yang mutakhir untuk keselamatan navigasi. Selain itu sesuai dengan *SOLAS Chapter V regulation 4*, Pushidrosal juga berkewajiban melaksanakan mandat negara untuk menyediakan layanan *navigational warning*. Pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya pasal 118 dan 185 disebutkan kembali tentang hidrografi sebagai bagian dari keselamatan navigasi, serta kewajiban pemerintah melaksanakan survei pemetaan hidrografi untuk meng-*update* peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta peta pelayaran sungai dan danau.

Pada perkembangannya, layanan hidrografi tidak hanya diperlukan untuk keselamatan navigasi, namun juga kepentingan nasional di laut lainnya. Sebagai lembaga hidrografi nasional, Pushidrosal berperan menyediakan referensi peta laut resmi untuk implementasi semua aspek yang diatur oleh UNCLOS. UNCLOS merujuk bahwa IHO adalah *competent organization on hydrographic subject*. Sesuai dengan UNCLOS Pasal 5,

16, 22, 24, 41, 47, 75, 84, 94, 134, peta laut sesuai standar IHO merupakan referensi utama untuk implementasi berbagai aspek yang diatur oleh UNCLOS antara lain: penarikan garis dasar; penarikan batas laut territorial, ZEE dan Landas Kontinen; menentukan TSS, menentukan rute hak lintas damai; penggelaran pipa dan kabel bawah laut; pengaturan pengeboran dasar laut; dan pengaturan riset ilmiah kelautan. Sedangkan untuk implementasi UNCLOS, IHO menerbitkan publikasi C-51 edition 6.0.0 tahun 2020 tentang *Manual on Technical Aspects of UNCLOS 1982*. TALOS bertujuan untuk menerjemahkan artikel-artikel UNCLOS ke dalam disiplin ilmu geografi, hidrografi dan ilmu bumi maritim. Pada perkembangan beberapa tahun terakhir, Pushidrosal juga ditugaskan untuk mendukung optimalisasi integritas data batimetri nasional Indonesia serta menjadi Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Teknis Penataan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Sedangkan pada penyelenggaraan penataan ruang laut di Indonesia, Peta Laut Indonesia (PLI) produk Pushidrosal menjadi referensi peta dasar. Selain itu, secara praktis Pushidrosal juga terlibat aktif menyediakan referensi peta laut untuk kegiatan nasional dalam rangka antara lain: diplomasi hidrografi di komunitas IHO, perundingan batas maritim; pengajuan landas kontinen ekstensi; perundingan instrumen UNCLOS *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ); proses AMDAL; serta berbagai kegiatan nasional lainnya yang membutuhkan referensi peta laut resmi sesuai standar IHO.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, visi Poros Maritim Dunia (PMD) yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Program Nawa Cita Nasional menyebutkan kedaulatan maritim serta pembangunan wilayah laut dan pesisir menjadi salah satu prioritas yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemajuan untuk Indonesia. Peningkatan pembangunan maritim tidak terlepas pada peranan hidrografi sebagai penyedia informasi kelautan informasi tersebut digunakan sebagai referensi utama dalam memberikan informasi kelautan, peningkatan perlindungan lingkungan laut, penopang keselamatan navigasi dilaut, pembangunan infrastruktur nasional, pengelolaan wilayah pesisir, eksplorasi sumber daya laut, penetapan batas wilayah, mitigasi bencana serta pertahanan dan keamanan dalam memajukan pembangunan nasional. Oleh karena itu, terjaminnya kebutuhan informasi hidrografi yang akurat akan menjadi faktor pengungkit dalam membangkitkan efek berantai terhadap pembangunan sektor lainnya, dan pada akhirnya menentukan keberhasilan pembangunan nasional, meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia yang didukung oleh kantor hidrografi nasional.

Penggunaan data hidrografi, secara umum dilakukan untuk mewujudkan jaminan keselamatan bagi seluruh pelaut yang berlayar di perairan Indonesia yang diwujudkan dalam produksi peta laut maupun publikasi navigasi lainnya. Selain daripada itu, gambaran potensi sumber daya laut nasional sebagai daya dukung dari kekuatan laut (*sea power*) tersebut dibutuhkan sebuah peta laut yang akurat dan mutakhir yang menggambarkan secara detail tentang karakteristik serta kondisi fisik dan geografis suatu perairan. Mengalir dari hal tersebut, proses pengembangan perekonomian nasional akan lebih banyak ditopang oleh kegiatan perdagangan menggunakan media laut dengan kapal sebagai wahana pengangkut muatan, baik untuk tujuan ekspor maupun impor. Data ekspor mencatat penggunaan moda kapal laut dalam proses ekspor sebesar 91.98% atau sebesar 154,2 miliar dolar, di mana nilai tersebut belum termasuk kegiatan ekonomi yang berasal dari aktivitas pelabuhan, kunjungan kapal pesiar (*cruise ship*), wisata bahari dan eksplorasi sumber daya alam lainnya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi dasar dalam kebutuhan peningkatan pemenuhan data hidrografi menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh negara.

Berbagai keuntungan bagi kepentingan nasional dapat dirasakan karena adanya layanan hidrografi. Layanan hidrografi membentuk bagian penting dari infrastruktur transportasi nasional dan juga infrastruktur data spasial maritim nasional. Di masa depan,

wilayah perairan akan menjadi area eksplorasi dan eksploitasi utama baik oleh pemerintah maupun industri. Pada dasarnya cukup sulit untuk mengkuantifikasi secara tepat keuntungan ekonomis yang mengalir dari layanan hidrografi nasional. Sejumlah penelitian internasional dilaksanakan untuk mengkuantifikasi benefit layanan hidrografi terhadap ekonomi. Salah satu kesimpulan utamanya adalah *cost to benefit ratio* layanan hidrografi adalah 1:10. Artinya setiap 1 unit biaya untuk hidrografi dapat menggerakkan ekonomi nasional hingga 1000%. Data BPS tahun 2020, nilai PDB dari sektor kelautan yang terkait hidrografi adalah kurang lebih 2800 triliun rupiah atau berkontribusi 26,86% kepada PDB nasional. Menurut penelitian Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tahun 2021, proyeksi PDB sektor kelautan pada tahun 2045 dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun adalah 11800 triliun rupiah atau berkontribusi 45,68% kepada PDB nasional.

Layanan hidrografi sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas dari masing-masing kementerian atau lembaga suatu negara. *Stakeholder* atau pemangku kepentingan sebuah program layanan hidrografi nasional antara lain, namun tidak terbatas pada: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Pariwisata RI, Tentara Nasional Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional, serta praktisi industri yang melaksanakan kegiatan ekonomi terkait dengan layanan hidrografi. Layanan hidrografi nasional Indonesia perlu diselenggarakan untuk memberikan dukungan bagi seluruh *stakeholder* maritim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan nasional di bidang maritim.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 288 Tahun 1968 tentang ratifikasi Konvensi IHO, Pemerintah RI menugaskan Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional guna menjadi wakil negara di organisasi internasional IHO. Hari hidrografi dunia dilaksanakan setiap tanggal 21 Juni dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hidrografi dan perannya dalam meningkatkan pengetahuan tentang kelautan di dunia. Tema hari hidrografi dunia tahun 2024 adalah "*Hydrographic Information – Enhancing Safety, Efficiency and Sustainability in Marine Activities*". Sejalan dengan peringatan hari hidrografi dunia 2024, Pushidrosal akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hidrografi tahun 2024. Rakornas Hidrografi 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional, dengan tujuan untuk menyampaikan capaian Pushidrosal serta untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan Pushidrosal di masa depan. Pushidrosal berharap Rakornas Hidrografi dapat dilaksanakan sebagai kegiatan pertanggungjawaban publik yang diselenggarakan secara regular dan berkelanjutan.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud. Maksud dari pelaksanaan Rakornas Hidrografi 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Pushidrosal atas perannya sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional.
- b. Tujuan. Tujuan dari Rakornas Hidrografi 2024 ini adalah untuk menyampaikan capaian Pushidrosal baik pada bidang pertahanan, dukungan keselamatan navigasi, kerjasama hidrografi nasional dan internasional, serta dukungan untuk kepentingan publik di bidang maritim lainnya, selanjutnya untuk mendapatkan masukan bagi transformasi organisasi Pushidrosal menuju lembaga hidrografi modern berkelas dunia.

4. Tema dan Sasaran

- a. Tema. “Pentingnya Hidrografi untuk Mendukung Pertahanan dan Pembangunan maritim Nasional”.
- b. Sasaran. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi militer dan lembaga hidrografi nasional melalui perbaikan program, layanan dan produk hidrografi yang diselaraskan dengan urgensi program strategis nasional dan kebutuhan nyata di lapangan.

5. Narasumber

- a. Narasumber Pushidrosal (Asopssurta Danpushidrosal, Aspamkersamtas Danpushidrosal, Kadisgeomar Pushidrosal), dengan perspektif tanggapan “Capaian Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional”.
- b. Narasumber 1, Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI), dengan perspektif tanggapan “Tantangan Hidrografi dalam Penataan Ruang Laut Indonesia”.
- c. Narasumber 2, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas RI), dengan perspektif tanggapan “Akselerasi Survei Hidrografi untuk Pembangunan Maritim Nasional”.
- d. Narasumber 3, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI), dengan perspektif tanggapan “Peran Hidrografi untuk Pelayaran dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Nasional”.
- e. Narasumber 4, Prof. Dr. rer.nar. Poerbandono, S.T., M.M. (Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Kelompok Keahlian Hidrografi), dengan perspektif tanggapan “Bersama Membangun Komunitas Hidrografi Nasional”.

6. Metode, Mekanisme dan Peserta Rakornas

- a. Metode dan mekanisme. Metode dan mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Rakornas Hidrografi 2024 adalah penyampaian materi oleh masing-masing narasumber sesuai topik bahasan, selanjutnya dilaksanakan diskusi tanya jawab dengan dipandu oleh seorang moderator.
- b. Peserta Rakornas. Peserta Rakornas Hidrografi 2024 adalah Kementerian/Lembaga *stakeholder* maritim, Perguruan Tinggi, Industri Maritim Hidrografi, Asosiasi Maritim.

7. Rencana Jadwal Kegiatan

- a. Tempat, waktu dan metode
 - 1) Tempat : Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - 2) Hari, tanggal : Selasa, 25 Juni 2024;
 - 3) Waktu : Pukul 08.00 s.d. 15.35 WIB; dan
 - 4) Metode : Luring dan Daring.

b. Persiapan

- 1) Persiapan tempat;
- 2) Konfirmasi kehadiran Narasumber dan Peserta; dan
- 3) Pengecekan jaring vicon.

c. Pelaksanaan

NO.	WAKTU	KEGIATAN
1	2	3
1.	07.00 – 07.30	<i>Joint Link Vicon</i> , undangan hadir dipersilahkan meninjau pameran
2.	07.45	Kasal hadir
3.	08.00	Menkomarves hadir
4.	08.00 – 08.05	Pembukaan MC
5.	08.05 – 08.10	Pembacaan doa
6.	08.10 – 08.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
7.	08.15 – 08.25	<i>Welcome Speech</i> oleh Danpushidrosal
8.	08.25 – 08.35	<i>Opening Remarks</i> oleh Kasal
9.	08.35 – 08.40	Seremoni pembukaan Rakornas Hidrografi 2024
10.	08.40 – 08.50	<i>Keynote Speech</i> oleh Menkomarves
11.	08.50 – 09.00	Foto bersama
12.	09.00 – 09.15	Penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan ITB
13.	09.15 – 09.45	<i>Coffe break</i> , Menkomarves didampingi Kasal & Danpushidrosal melaksanakan peninjauan pameran dan <i>Door Stop</i>
14.	09.45 – 09.50	MC menyerahkan acara kepada Moderator
15.	09.50 – 09.55	<i>Opening Moderator</i> , mempersilahkan Narasumber Asopssurta Danpushidrosal, Aspamkersamtas Danpushidrosal dan Kadisgeomar Pushidrosal menempati panggung
16.	09.55 – 10.00	Moderator membacakan <i>Curriculum Vitae</i> Narasumber
17.	10.00 – 10.20	Paparan Asopssurta Danpushidrosal
18.	10.20 – 10.40	Paparan Aspamkersamtas Danpushidrosal
19.	10.40 – 11.00	Paparan Kadisgeomar Pushidrosal
20.	11.00 – 12.00	Diskusi sesi ke-1
21.	12.00 – 13.00	Ishoma
22.	13.00 – 13.05	<i>Opening Moderator</i> , mempersilahkan Narasumber menempati panggung, dan membacakan <i>Curriculum Vitae</i>

23.	13.05 – 13.20	Paparan Narasumber dari Bappenas RI
	13.20 – 13.35	Sesi Pertanyaan Narasumber Bappenas RI
24.	13.35 – 13.50	Paparan Narasumber dari KKP RI
25.	13.50 – 14.05	Paparan Narasumber dari Kemenhub RI
26.	14.05 – 14.20	Paparan Narasumber dari ITB
27.	14.20 – 15.05	Diskusi sesi ke-2
28.	15.05 – 15.10	Penutup Moderator, penyerahan kepada MC
29.	15.10 – 15.15	Pembacaan <i>resume</i> Rakornas oleh Kapoksahli Pushidrosal
30.	15.15 – 15.20	Penyerahan cinderamata dan <i>goodie bag</i> kepada Moderator dan Narasumber
31.	15.20 – 15.25	Penutupan Rakornas Hidrografi 2024 oleh Danpushidrosal
32.	15.25 – 15.30	Menyanyikan lagu Bagimu Negeri
33.	15.30 – 15.35	Penutup MC
34.	15.35	Rakornas selesai

d. Makalah dan Paparan. Para narasumber diharapkan dapat mengirimkan/menyerahkan makalah dan/atau materi yang dilampiri *curriculum vitae* dalam bentuk *soft-copy*, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2024 kepada sekretariat pelaksana kegiatan workshop dengan alamat email:

- 1) *E-mail*: rakornas_pushidrosal_2024@gmail.com; dan
- 2) *Contact persons*: Letkol Laut (P) Ferdy Manase, nomor HP. 08124861238.

8. Penutup. Demikian TOR ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi narasumber dalam menyiapkan bahan Rakornas sesuai dengan topik yang diharapkan.

Jakarta, 3 Juni 2024

Ketua Panitia Kegiatan Peringatan
Hari Hidrografi Dunia 2024 Pushidrosal,



Yudi Kuncoro, S.T., M.M.
Kolonel Laut (P) NRP 13273/P